

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia“ mempunyai arti sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹

Peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang atau lembaga apabila melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi selanjutnya.²

¹Pius A .Purtanto, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1998), hal. 585.

²Wahyuningsih, Dwi. “Peran Asatidz Dalam Menggunakan Metode Bahtsul Masa’il Untuk Meningkatkan Kecerdasan Intelektual Santri Pada Kajian Fiqih Di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Udanawu Blitar”. Skripsi . Tulungagung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, 2018.

Dalam teori Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional terhadap orang lain. Melalui pola-pola cultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar *siapa* mereka di depan orang lain dan *bagaimana* mereka harus bertindak terhadap orang lain. Secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu.
2. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan .
3. Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit.³

Sedangkan yang dimaksud peran disini adalah fungsi atau kegunaan sesuatu terhadap hal lain yang diharapkan kemanfaatan atau perubahannya.

B. Kajian Tentang Bahtsul masa'il

1. Pengertian Bahtsul masa'il

Bahtsul masail, merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu *Bahts* dan *Masail*. Kata *bahs* merupakan bentuk *masdar* dari

³Indah Ahdiah, "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat", *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, Vol. V, 2 (2 Oktober 2013), h. 1087.

kata *bahatsa* yang memiliki arti menyelidiki, memeriksa atau membahas.⁴ Sedangkan kata *masa'il* merupakan bentuk jamak dari kata *mas'alatun* yang memiliki arti “masalah” atau “permasalahan”.⁵ Dengan demikian secara bahasa bahtsul masail mempunyai arti: pembahasan masalah-masalah. Dalam pengertian ini, kegiatan bahtsul masa'il merupakan sebuah aktifitas keilmuan yang dilakukan untuk membahas setiap permasalahan atau problematika yang terjadi dalam dinamika kehidupan manusia guna ditemukannya jawaban serta formulasi terhadap permasalahan tersebut.⁶

Lembaga Bahtsul Masail/ Bahtsul Masail ialah salah satu forum yang membahas permasalahan yang belum ada dalilnya atau belum diketahui solusinya. Masalah tersebut meliputi semua masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat. Masalah tersebut dikaji dan dicarikan jalan keluarnya yang mengacu pada *Kutubul Mu'tabaroh*.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan kitab *mu'tabar* adalah *al-kutub 'ala al-madzahib al-arba'ah* (kitab-kitab mengacu pada madzhab empat).⁸

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 1986), h. 59.

⁵Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), h. 601.

⁶Palah, “Model Evaluasi Pendidikan Melalui Kegiatan Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Assalafiyah 1 Sukabumi”, *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, 2, (Juni 2018), h. 78.

⁷Kudrat Abdillah, Maylissabet, M. Taufiq, “Peran Lembaga Bahtsul Masail Pesantren Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer”, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. II, 1 (Juni 2019), h. 70.

⁸Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. 146.

Lajnah Bahtsul Masa'il juga merupakan forum perluasan wawasan intelektual dan wawancara keagamaan karena dalam forum ini terbuka kemungkinan untuk mencetuskan ide-ide baru, tidak hanya terkait hasil-hasil keputusan, tapi juga dapat berkenaan dengan mekanisme kerja untuk memecahkan suatu masalah.⁹

Pada dasarnya, kegiatan bahtsul masail merupakan aktivitas yang sangat lekat dan identik dengan pondok pesantren dan jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). Karena bahtsul masail merupakan salah satu tradisi intelektual yang sudah mengakar dalam diri pesantren dan NU itu sendiri. Bahkan di sebagian pesantren menjadikan bahtsul masail sebagai salah satu metode pembelajaran untuk para santri.¹⁰ Tradisi Bahts al-Masail sebenarnya sudah ada sebelum NU berdiri. Tradisi musyawarah dan diskusi (halaqoh) sudah menjadi kebiasaan pesantren yang hasilnya disosialisasikan pada masyarakat. Tradisi ini digunakan selain untuk mengkaji perkembangan pengetahuan, juga untuk mengkaji berbagai problem aktual yang terjadi masyarakat.¹¹

Forum *Bahtsul Masail* ini sangat berperan penting dalam mengembangkan daya kritis santri dalam berdiskusi. Santri diharapkan dapat memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi pembahasan tersebut, santri diuntut agar mampu berargumen dan

⁹Zahro, h. 72.

¹⁰Palah, "Model Evaluasi Pendidikan Melalui Kegiatan Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Assalafiyah 1 Sukabumi", *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, 2, (Juni 2018), h. 79.

¹¹Eni Zulaiha, B. Busro, "Tradisi Bahts al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. XIX, 2 (Juli, 2020), h. 207.

memberikan pendapat dengan dasar pengetahuan yang sudah dimiliki beserta referensi-referensi yang telah dikaji, sehingga setelah mengikuti *Bahtsul Masail* santri dapat berpikir kritis dalam mengkaji dan dapat menganalisis semua kajian atau informasi yang santri dapat.¹²

Latar belakang munculnya *bahts al-masa'il* (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahts al-masa'il*. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa *bahths al-masa'il* pertama dilaksanakan pada 1926, berapa bulan setelah berdirinya NU.

Perlu dicatat meskipun kegiatan *bahths al-masa'il* sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun institusi Lajnah Bahts Al-Masa'il baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (Bahts Al-Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "*Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah*" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani masalah keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah*" dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk

¹²Azam, Khoiruman. "Meningkatkan Daya Kritis Santri Melalui Forum Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro". Skripsi. Metro: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018.

melakukan *istibat jama'iy* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Mukhtar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah *Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah* berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/1990.¹³

Ditinjau dari perspektif-komparatif, kalau NU memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lajnah Bahtsul Masa'il, maka organisasi Islam yang lain seperti SI (Sarekat Islam), Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), al-Jam'iyatul Washliyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan dengan Lajnah Bahtsul Masa'il. Di Sarekat Islam itu dinamakan *Majelis Syuro*, di Muhammadiyah ada *Majlis Tarjih*, di Persis ada *Dewan Hisbah*, di al-Jam'iyatul Washilah ada *Dewan Fatwa*, sementara di MUI ada *Komisi Fatwa*.¹⁴

Dari sudut pandang hierarki yuridis-praktis, dalam arti struktur jenjang pengambilan keputusan, *bahts al-masa'il* yang diadakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi dan memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan. Lajnah Bahts Al-Masa'il PBNU juga merupakan lembaga yang menangani masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam *bahts al-masa'il* tingkat wilayah, cabang atau pesantren.¹⁵

¹³Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. 68.

¹⁴Zahro, h. 74.

¹⁵Zahro, h. 76.

2. Konsep Bahtsul Masa'il

Bahtsul masa'il merupakan sebuah forum diskusi di dalam pesantren seputar keilmuan Islam, terutama problematika fiqh. Dalam forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum terdapat hukumnya dibahas secara mendalam.

Tradisi intelektual Islam, *bahtsul masail* diselenggarakan hampir oleh seluruh pondok pesantren termasuk Pondok Pesantren Mahir ar-Riyadh Ringinagung. Fungsi dengan diadakannya *bahtsul masail* ini yaitu untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di masyarakat untuk dicarikan permasalahannya

Bahtsul al-Masail NU diikuti oleh peserta yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang santri murni, alumni pesantren yang kemudian meneruskan ke perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi murni, dan para kiai pimpinan pondok pesantren. Mereka memiliki mindset dan paradigma yang berbeda dalam memahami fakta dan rujukan kitab. Keragaman latar belakang ini yang menjadikan kajian kaya persepektif, meskipun kitab yang dirujuknya sama, tapi pemahaman berbeda-beda.¹⁶

Dalam pembahasan sistem *bahtsul masail*, perlu adanya langkah-langkah *bahtsul masail* sebagai berikut: a). Penentuan hukum yang dilakukan oleh LBM adalah respon terhadap pertanyaan dari berbagai daerah dari berbagai organisasi yang pernah mengikutinya, b). sebelum

¹⁶Eni Zulaiha, B. Busro, "Tradisi Bahtsul al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. XIX, 2 (Juli, 2020), h. 208.

diajukan ke tingkat LBM nasional, masalah itu sudah dibahas di LBM sesuai dengan jajarannya, c). Melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya sebelum sidang LBM dimulai, d). Mencari jawaban dari kitab-kitab klasik, modern atau majalah yang ditulis oleh para ulama' yang diakui keaslian ilmunya.¹⁷

Proses masuknya masalah di *bahts al-masa'il* adalah sebagai berikut. Jika ada permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat, maka mereka mengajukannya kepada Majelis Syuriah NU tingkat Cabang (Kabupaten, Kota atau Pesantren Besar) guna menyelenggarakan sidang *bahts al-masa'il* yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Syuriah NU tingkat wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang *bahts al-masa'il* guna membahas permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan ke Majelis Syuriah PBNU (Pusat) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas permasalahannya, dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para ulama dan cendekiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota Lajnah Bahts Al-Masa'il agar dipelajari dan Lajnah Bahts Al-Masa'il dipersiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan keputusannya oleh Lajnah Bahts Al-Masa'il dalam sidang *bahts al-masa'il* yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar atau Munas Alim Ulama NU.

¹⁷Nurul Lailiyah, Nur Hani'ah, "Manajemen Pembelajaran Berbasis *Bahtsul Masail* Pada Mata Pelajaran Fiqih Ibadah di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang", *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. IV, I (Maret, 2020), h. 57.

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempu Lajnah Bahts Al-Masa'il sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan 4 madzhab, terutama madzhab Syafi'i. Hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional. Sedangkan ulama tradisionalis, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan *harfiyah* (secara kontekstual) hukum-hukum fiqh yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu.¹⁸

Dalam kegiatan bahtsul masa'il, melibatkan banyak santri dari berbagai macam disiplin ilmu diantaranya fiqh, ushul fiqh, hadist, dan lainnya yang dikaji secara komprehensif. Selain itu mengutip pula pendapat ulama secara *qauliy* dan *manhajiy*.

3. Metode Penggalan Hukum Dalam Bahtsul Masail

Metode penggalan hukum yang diterapkan di Pondok Pesantren pada umumnya mengacu pada metode yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu:

a). Metode *Qouly* adalah suatu cara istimbath hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu

¹⁸Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. 78.

dan merujuk secara langsung bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.

b) Metode *Ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”.

c) Metode *Manhajiyy* (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.¹⁹

4. Manfaat Bahtsul Masail

Menurut M. Syarif Hidayatulloh dalam jurnal yang dia tulis yang berjudul “Pembelajaran Kontekstual Dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang”, manfaat dari Bahtsul Masail yaitu menjadikan siswa/santri berfikir kritis, solutif dan kontekstual. Menurut Muhammad Cholis dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Bahtsul Masa’il Sebagai *Problem Based Learning (PBL)* di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo Tanggunharjo Grobogan”, dan menurut Khoiruman Azam, dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul “Meningkatkan Daya Kritis Santri Melalui Forum Bahtsul Masa’il di Pondok Pesantren Darul

¹⁹Kudrat Abdillah, Maylissabet, M. Taufiq, “Peran Lembaga Bahtsul Masail Pesantren Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer”, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. II, 1 (Juni 2019), h. 72-74.

A'mal Kota Metro Bahtsul Masail mempunyai manfaat, bagi santri khususnya, dapat mengeluarkan nalar kritis di dalam penyelesaian sebuah masalah serta mengembangkan daya kritis santri dalam mengambil keputusan. Menurut Moh. Imdadur Rahman dalam Tesis yang ditulis pada tahun 2016 yang berjudul "Pengaruh Metode Bahtsul Masa'il Terhadap Motivasi Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Bidang Fiqih Kelas XI PK di MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo", Kegiatan Bahtsul Masail Bahtsul Masail dapat meningkatkan motivasi belajar siswa/santri. Sedangkan Menurut Dwi Wahyuningsih, dalam skripsi tahun 2018 yang berjudul "Peran Asatidz Dalam Menggunakan Metode Bahtsul Masa'il Untuk Meningkatkan Kecerdasan Intelektual Santri Pada Kajian Fiqih Di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar". Bahtsul Masail bermanfaat meningkatkan kecerdasan intelektual aspek kecerdasan linguistik-verbal Santri dan kecerdasan Intelektual Aspek Kecerdasan Logis Matematis Santri.

C. Kajian Tentang Literasi

1. Pengertian Literasi

Istilah literasi berasal dari bahasa *litteratus* yang berarti "*a learned person*" atau orang yang belajar. Pada abad pertengahan, seorang *litteratus* adalah orang yang dapat membaca, menulis, dan bercakap-cakap dalam

Bahasa Latin. Pada perkembangan selanjutnya, kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca tapi juga menulis.²⁰

Menurut Kern, sebagaimana dikutip oleh Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, literasi secara sempit didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, termasuk didalamnya pembiasaan membaca dan mengapresiasi karya sastra serta melakukan penilaian terhadapnya. Sedangkan secara luas, Kern mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk berpikir dan belajar seumur hidup untuk bertahan dalam lingkungan sosial dan budaya. Mc Kenn dan Robinson menyatakan bahwa literasi merupakan suatu media bagi individu agar mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya terutama yang berkaitan dengan kemampuan menulis.²¹

Membaca dan menulis adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Seseorang yang akan menulis maka tentu dia akan melakukan kegiatan membaca terlebih dahulu meskipun kegiatan membaca tidak harus diikuti dengan kegiatan menulis. Jadi secara sederhana literasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis.²²

Membaca pada hakikatnya adalah suatu kegiatan rumit yang melibatkan banyak hal, dalam membaca tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, akan tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berfikir,

²⁰Singgih D. Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), h.44.

²¹Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 25.

²²Abu Masykur, "Budaya Penguatan Literasi di Pondok Pseantren", *IQ (Ilmu Qur'an) :Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.I, 01 (2019), h. 16.

psikolinguistik, dan metokognitif. Sebagai proses visual membaca yaitu menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata lisan. Sebagai proses berfikir membaca mencakup aktifitas pengenalan kata, pemahaman literal interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif.²³ Sedangkan menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut yang didalamnya mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambar huruf-huruf disebut karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran, gagasan, pendapat, pengalaman disusun secara sistematis dan logis.²⁴

Dapat dipahami pengertian dari literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.

2. Perkembangan Literasi

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara dan menyimak. Jika ditelisik secara komprehensif, perubahan konsepsi literasi terjadi dalam lima generasi. Pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang

h. 2. ²³Farida Rahim, *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

²⁴Sutari, *Dasar-dasar Kemampuan Menulis*, (Bandung: FPBS IKIP, 1997), h. 26.

kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan data dan berpikir kritis tentang ide-ide. Perkembangan kedua, literasi sebagai praktik sosial dan budaya tinimbang dipandang sebagai prestasi kognitif yang bebas konteks.

Dalam generasi ketiga, literasi diperluas kedalam beberapa jenis elemen literasi, seperti visual, auditori dan spasial daripada kata-kata yang tertulis. Dalam generasi keempat, literasi dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral. Teks yang ditulis peneliti telah dibentuk berdasarkan posisi mereka (dimana mereka berada dan dimana mereka berdiri, serta bagaimana posisi ini memungkinkan mereka untuk melihat dan tidak melihat). Generasi kelima, untuk menjadi literat pada abad informasi ini berarti harus mampu menggambarkan beberapa perangkat keterampilan literasi dalam berbagai keberagaman domain literasi.

Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.²⁵ Di abad ke-21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen dari literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Literasi Dini (*Early Literacy*), yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang

²⁵Ika Fadilah Ratna Sari, "Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah Pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti", *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, Vol. X, 1 (Juni, 2018), h. 93-94.

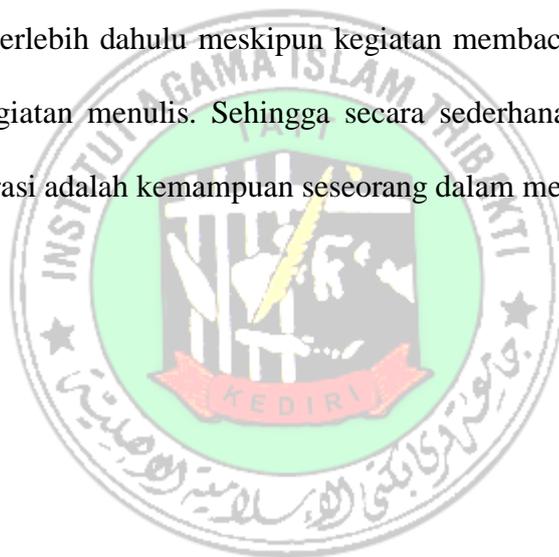
dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah.

2. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
3. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
4. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
5. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*),

peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.

6. Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.²⁶

Membaca dan menulis adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Seseorang yang akan menulis maka tentu dia akan melakukan kegiatan membaca terlebih dahulu meskipun kegiatan membaca tidak harus diikuti dengan kegiatan menulis. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis.



²⁶Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VIII, 5 (2017), h. 86.